

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
TAHUN 2012**

Oleh:

Rima Melati Pohan

Email : melatir37gmail.com

Pembimbing : Dra. Wan Asrida, M.Si

**Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp / Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Pekanbaru City Government through Bappeda (Planning Board) Pekanbaru City has made a program called RKPJM (Work Plan medium term) of Pekanbaru. Where in the city of Pekanbaru Regional Regulation No. 19 Year 2012 on Regional Medium Term Development Plan 2012-2017 Pekanbaru City Year. It is intended that the Development that has direncana run in accordance with what has been planned by the City of Pekanbaru.

The purpose of this research is to determine the extent to which the conduct of the program development or improvement of the road where the Department of Public Works as on education (regional work units) PDId has been run in accordance with what has been planned and laid Musrenbang RKPD location within the city of Pekanbaru. This study was conducted in 2012 Year of Peace Marpoyan Where the informants in this study are those who understand the problems that occur Pekanbaru City Public Works Department officials, the District officers and officials of Peace Marpoyan Bappeda Pekanbaru. In pengumpulan the data obtained from the documentation and in-depth interviews to the informant. Having collected and then analyzed using descriptive analysis.

Evaluation of the implementation of the program can be known from its implementation. Does the implementing of these programs succeed or fail. In implementing a program must menemukan constraints faced by the implementing agency of the program activities.

Keywords : *policies, programs, improvement of road infrastructure*

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pembangunan sebagai akibat dari reformasi, dimana sebelumnya lebih berorientasi pada pertumbuhan dengan sistem sentralistik yang begitu kuat, telah berubah ke sistem desentralisasi yang lebih berorientasi ke arah pemerataan, telah mulai memberikan dampak yang lebih baik bagi perkembangan pembangunan. Kegiatan pembangunan daerah yang begitu cepat telah memberikan dampak perkembangan perekonomian yang begitu luas. Hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan.

Isu infrastruktur yang paling penting yang harus ditangani oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu :

1. Masalah banjir dan genangan air
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan
3. Perlunya peningkatan infrastruktur perkotaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung mobilitas penduduk, perdagangan barang dan jasa.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk mengatur apa-apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan perbaikan di bidang pembangunan. Itu tertuang didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Penyusunan program prioritas tersebut dibuat dengan memperhatikan kebijakan pembangunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025.

Dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekanbaru meliputi memajukan perekonomian masyarakat, mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, mewujudkan lingkungan dan masyarakat yang berbudaya melayu, mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mewujudkan pekanbaru yang asri, lestari dan bersih serta mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Visi dan Misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 merupakan Visi dan Misi Walikota terpilih. Dalam Visi dan Misi tersebut, prioritas pembangunan yang diusung Walikota terpilih meliputi; sumberdaya manusia yang handal dan bertaqwa, pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur sebagai kota metropolitan, lingkungan hidup, peningkatan perekonomian dan kesempatan bekerja/berusaha serta

membangun komitmen bersama yang mencakup infrastruktur, ekonomi (penanggulangan kemiskinan), pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian, untuk kemudian dianalisis dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang ada.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan titik fokusnya di Kecamatan Marpoyan Damai dengan luas wilayah berkisar 29,74 km² dengan jumlah penduduk sekitar 127.369 jiwa. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki 5 Kelurahan, yaitu Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Maharatu dan Kelurahan Wonorejo.

data yang diperoleh oleh penulis dengan langsung terjun kelapangan yang diperoleh langsung dari key informan dari data yang menjadi objek penelitian.

Teknik sampling dalam penelitian ini bersifat purposive, sehingga yang menjadi subjek penelitian (informan) adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang memadai berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini. Oleh karena ini, terdapat beberapa subyek penelitian yang sengaja dipilih dan ditentukan peneliti sebagai sumber data. Subyek-subyek penelitian tersebut adalah :

1. Unsur Bappeda
2. Unsur Kecamatan

3. Dinas yang terkait

Data yang sudah diolah yang diperoleh dari lembaga atau instansi yaitu Bappeda Kota Pekanbaru, BPS Kota Pekanbaru, Dinas PU Kota Pekanbaru Kecamatan Kota Pekanbaru dan instansi-instansi lainnya yang diperoleh sebagai hasil catatan dan laporan yang sudah ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti jumlah jalan yang ada di kota pekanbaru, biaya perbaikan, drainase dan pembutan jalan, daftar jalan-jalan yang rusak dan lain sebagainya.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara terpinpin, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan Dinas yang terkait.
- b. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan.

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto-foto dan sebagainya. Secara detail bahan dokumenter terbagi menjadi beberapa macam yaitu otobiografi, buku, catatan harian, kliping, dokumen pemerintah, website dan lain-lainnya.

Setelah data terkumpul, dikelompokkan menurut jenisnya kemudian disajikan dalam tabel dengan angka-angka dan persentase kemudian penulis menganalisa data menggunakan metode deskriptif yaitu merupakan suatu cara menganalisa

yang dilengkapi dengan uraian – uraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah kebijakan umum yang dituangkan ke dalam program-program pembangunan daerah. Sasaran, strategi dan arah kebijakan beserta indikator (outcome). Diperlukan kebijakan umum dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia lainnya yang terampil, siap pakai dan berkarakter serta penggalan potensi sumber daya alam. Arah kebijakan umum pembangunan diupayakan mendorong percepatan perubahan struktur perekonomian rakyat sehingga memperkuat kedudukan dan peran ekonomi kerakyatan. Perubahan struktur ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi yang kuat dan tangguh, yang tidak hanya memihak kepada golongan bermodal kuat. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada pemerataan pembangunan, penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan ramah lingkungan dan menciptakannya lingkungan kota yang metropolitan yang madani, melalui peningkatan pelayanan masyarakat yang prima, bersih, santun dan bertanggungjawab terjangkau bagi masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Pekanbaru Jangka Menengah yang meliputi sasaran, strategi, indikator dan capaian kinerja pembangunan.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan visi dan

menjalankan misi, arah kebijakan sesuai dengan RPJP Nasional kemudian RPJP Daerah Kota Pekanbaru, arah kebijakan ekonomi kota Pekanbaru adalah bagian dari arah kebijakan pembangunan kota Pekanbaru yaitu memajukan perekonomian masyarakat yang diarahkan pada:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat agar mampu memenuhi kehidupan yang layak.
2. Memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Memperlancar arus investasi yang dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
4. Mendorong tabungan masyarakat untuk memperluas kesempatan investasi dan pembukaan lapangan usaha.
5. Meningkatkan daya saing produk-produk masyarakat kota Pekanbaru untuk mengurangi ketergantungan pada produk import.
6. Meningkatkan kerjasama perekonomian guna mendorong masuknya modal asing yang sejalan dengan kaidah budaya melayu.
7. Membangun infrastruktur ekonomi yang memadai bagi terselenggaranya usaha ekonomi masyarakat, antara lain pembangunan pasar induk, Terminal Cargo, Pelabuhan bongkar muat, Sentra Perdagangan dan World Trade (WTC) sebagai tempat Pameran (Exhibition Hall), serta pengembangan kawasan industri di kota Pekanbaru terutama kawasan industri Tenayan sebagai prioritas utama.

8. Pengembangan kelembagaan yang mendukung kemajuan ekonomi masyarakat, seperti kelembagaan Metrologi tingkat Kota Pekanbaru yang di dukung Sumber Daya Manusia yang terlatih dan profesional.
9. Penegakan hukum dan regulasi yang tegas dalam dinamika perekonomian sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
10. Memperluas akses terhadap sumber permodalan meningkatkan kemampuan menyerap dan mengaplikasikan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah (Value added), memperluas dan mengembangkan sistem informasi yang mampu diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku ekonomi.
11. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yaitu dengan melakukan upaya pengembangan dan pemberdaya ekonomi yang berbasis kerakyatan yang lebih kokoh melalui penyediaan fasilitas yang memadai, menumbuhkan-kembangkan aktivitas perekonomian yang berakar dari nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat yang cenderung heterogen namun tetap bercirikan Melayu, menumbuh kembangkan pasar-pasar tradisional yang berkualitas.

Penyusunan RKPD ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau, dalam rangka mensinergikan percepatan pencapaian target kinerja antara program pembangunan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota khususnya Kota Pekanbaru.

RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2012 yang berisi tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Kota Pekanbaru. Dengan demikian materi dalam RKPD-P tetap merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat secara bottom up yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan SKPD yang bersifat top down yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD. Berdasarkan hasil pepaduserasian, kondisi riil dan dinamika perkembangan masyarakat tahun 2012, maka isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan.
2. Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan.
3. Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
4. Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan.
7. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.
8. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan

arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki pengaruh kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Maksud dari analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Penulis akan membahas pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2012, serta mencari apa saja permasalahan yang dihadapi dan apa saja faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di kecamatan tersebut.

Evaluasi harus menentukan aspek-aspek dari obyek yang akan dievaluasi. Menurut Bridgman dan Davis dalam Karding (2008:35) yaitu evaluasi program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu :

- a. Indikator input.
- b. Indikator process.

- c. Indikator outputs.
- d. Indikator outcomes.

Tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Adapun dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui tiga dimensi yaitu :

a. Evaluasi pada tahap perencanaan. Pada tahap ini, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan pada tahap ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, rata-rata

pertumbuhan untuk setiap item pendapatan daerah dicantumkan pada kolom terakhir. Pendapatan asli daerah menunjukkan kecenderungan pertumbuhan rata-rata sebesar 21,2% pertahun. Pajak daerah memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 30,7% pertahun. Sementara itu, Dana Perimbangan tumbuh rata-rata 5,7% pertahun yang didominasi oleh pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 27,1% pertahun. Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar rata-rata 39,5% pertahun yang didominasi oleh bagi hasil pajak dari provinsi yang tumbuh rata-rata 54,4% pertahun. Secara keseluruhan, pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tumbuh rata-rata sebesar 10,1% dari tahun 2008 ke tahun 2012. Angka pertumbuhan rata-rata ini cukup menggembirakan karena didominasi oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Karena itu, di dalam prediksi untuk lima tahun kedepan, diambil nilai pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 10% pertahun.

Sebagai penanggung jawab pada pelaksanaan program pembangunan jalan Dinas PU mempunyai SOTK, tugas dan fungsinya. Dibawah ini akan dijelaskan SOTK ,tugas dan fungsi dari Dinas PU itu sendiri.

Tugas Bidang Prasarana dan Sarana Jalan, yaitu :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan kepala dinas dalam rangka

- penyusunan kebijaksanaan, program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, perencanaan, pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan.
 3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan dalam rangka pengembangan industri jalan dan jembatan.
 4. Menkoordinasikan, membina dan merumus usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan.
 5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan persiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan.
 6. Melaksaaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan jalan.
 7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberi izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan undang-undang yang berlaku.
 8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis kepada pihak terkait dengan kegiatan pembangunan.
 9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka pembangunan jalan.
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Bidang Prasarana dan Sarana Jalan, yaitu :

1. Penyusunan program kerja.
2. Pengkoordinasian perencanaan, pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan.
3. Pembinaan dan perumusan pengembangan industri jalan dan jembatan.
4. Pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
5. Pemberian saran saran, pertimbangan dan rekomendasi pengaturan dan pemberian izin.
6. Pemberian petunjuk teknis kepada pihak terkait dengan kegiatan pembangunan, pemeliharaan rutin dan rehabilitas jalan.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya.

Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, indikator kinerja daerah pada dasarnya merupakan akumulasi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya olehkarenanya indikator kinerja daerah yang ditetapkan harus dapat dicapai dan didukung oleh setiap SKPD, Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima

tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Dalam penetapan Indikator kinerja daerah perlu memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat, memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada serta memperhatikan kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. Hal ini menjadi pertimbangan, karena apa yang diinginkan oleh Walikota dan Wakil Walikota tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat, potensi yang dimiliki oleh daerah serta semangat dan loyalitas aparatnya yang tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja ini membutuhkan pula dukungan dari masyarakat serta DPRD secara objektif dan rasional. Oleh karena itu keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD termasuk penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan memenuhi aspek politik

dan aspek formal yang disyaratkan. Aspek politik menyangkut proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam konsultasi publik dan Musrenbang Penyusunan RPJMD. Aspek formal meliputi pemenuhan atas prosedur, tahapan, dan administratif sesuai ketentuan yang ada.

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2012 sampai 2017. Penetapan target kinerja telah diupayakan dapat menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), terjangkau (*achievable*), relevan (*relevant*), terikat waktu (*time bond*), dan peningkatan yang berkelanjutan (*continously improve*). Spesifik sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Terukur (*measurable*) karena memiliki angka pencapaian tertentu. Terikat waktu (*time bond*) karena memiliki batasan periode tahun 2012-2017 serta target tahunannya. Peningkatan yang berkelanjutan (*continously improve*) karena berusaha melakukan peningkatan secara terus menerus dan bertahap setiap tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Penetapan Indikator Kinerja
Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan**

N o.	Indikator Kinerja Pembaguanan.	Kond isi Kiner ja	Target Capaian Kinerj a Tahun an
		2011	2012
1	- Rasio Panjang jalan Kondisi Baik dibandingkan panjang jalan seluruhnya. - Rasio jalan Tanah yang dibangun/total jalan tanah.	45% 32%	49% 35%

Sumber : RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

Dengan adanya RKPD Kota Pekanbaru dapat diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berlajalan sesuai dengan apa yang dituang kan didalam RKPD Kota Pekanbaru. Dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Pekanbaru Tahun 2012, SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Kota) Pekanbaru yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program jalan yaitu Dinas PU. Dalam program perbaikan infrastruktur, Kecamatan Marpoyan Damai dan Dinas PU dalam musrenbang tahun 2011 mengusulkan beberapa prioritas dari perbaikan atau pemeliharaan insfrastruktur jalan di kecamatan

tersebut. Usulan pada musrenbang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Usulan program pemeliharaan /
perbaikan jalan pada
Musrenbang Tahun 2011**

N o.	Usulan Kecamatan	Usulan Dinas PU Kota Pekanbaru
1.	a. Pengerasan Jalan - Jl. Abadi -Jl. Pias -Jl. Nursuroyo -Jl. Mutiara Paus -Jl. Menuju TPS RW 06	a. Pengerasan -Jl. Rambutan V -Jl. Guansai -Jl. Helicopter -Jl. Rawa Indah
	b.Pengasp alan Hotmix -Jl. Asrama -Jl. Baung -Jl. Rajawali Raya -Jl.Rimbo Petai -Jl. Dakota -Jl. Paus -Jl. Gelatik -Jl. Sari Kencana	b.Pengasp alan Hotmix -Jl. Lele -Jl. Pinang -Jl. Dakota -Jl. Bakti II -Jl. Arwana -Jl.Rawa Mulia -Jl.Rawa Insani -Jl. Hanggar -Jl. Manila II -Jl. Pandan Sari -Jl.Rambutan
3.	Overlay Hotmix	- Jl. Kepiting - Jl.Toman - Jl.Gambolo - Jl. Khayangan Jl. Merak IV,VII

Untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan perbaikan jalan yang terjadi dilapangan peneliti dapat melihat pelaksanaannya dari DPA (Daftar Penggunaan Anggaran) karna dari DPA tersebut peneliti dapat mengetahui berapa banyak ruas jalan yang diperbaiki karna RKPD adalah sebuah rencana kerja dimana rencana kerja tersebut bisa saja tidak sesuai dengan rencana yang dimasukan kedalam musrenbang tahun 2011. Dari RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat kita lihat ada sekitar 24 ruas jalan yang diusulkan dan pelaksanaannya dilapangan ha nya sekitar 13 ruas jalan atau sekitar 5160m yang terlaksana. Data ruas jalan tersebut dapat kita lihat di DPA (Daftar Penggunaan Anggaran) Dinas PU sebagai berikut : Jl. Nurul Amal, Jl. Melati, Jl. Rawa Insaani. Jl. Pinggir Parit PU menuju Masjid Amal Khairat dan Jl. Hanggar. Jl. Bambu menuju lokasi pemakaman. Jl. Nila, Jl. Sepat, Jl. Ragi dan Jl. Kepiting, Jl. Gelatik. Kel. Tangkerang Tengah, Jl. Toman Dan Jl. Udang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh diatas dapat dilihat sangat jauh usulan perbaikan yang disampaikan dengan realisasi dilapangan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian ruas saja yang terealisasi sehingga menimbulkan pertanyaan penulis mengapa usulan yang disampaikan sebanyak kurang lebih 24 ruas jalan yang harus diperbaiki namun yang terealisasi sekitar 13 ruas jalan. **Berikut hasil wawancara penulis kepada Bapak H. Amir Husin ST sebagai berikut:**

RKPD hanyalah sebuah rencana kerja yang kita ajukan pada

musrenbang Tahun 2011, dimana sebuah rencana belum tentu dapat diterima sesuai dengan rencana kerja yang diajukan oleh kita (Dinas PU).Ini dikarenakan dana yang kita ajukan tidak dapat diterima keseluruhanya karna anggaran yang kita ajukan di tahun 2011 tidak dapat terpenuhi ditahun 2012. Pemerintah memangkas sebagian dana yang diperuntukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dengan alasan masih banyak lagi kegiatan diluar perbaikan jalan yang menjadi prioritas pemerintah daerah Kota Pekanbaru, misalnya kegiatan penanganan kemiskinan, pendidikan dan lain sebagainya. Sejauh ini pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan jalan sudah terlaksana sesuai capaian. Namun kami (Dinas PU) tidak tinggal diam terhadap beberapa jalan yang perlu penanganan karna jika jalan tersebut tidak ditangani akan dapat mengakibatkan kecelakaan terhadap pengguna jalan. Namun segi penanganannya yang berbeda, ini dikarenakan dana yang digunakan minin. Dana ini diperoleh dari sisa DPA perbaikan jalan dengan sistem penanganan Hotmix dan Overlay Hotmix. Jadi sistem yang kita gunakan untuk menangani jalan yang rusak yaitu dengn sistem Tambal Sulam. Sistem tambal sulam ini merupakan sistem dimana jalan yang berlobang di tambal dengan aspal biasa, walaupun sistem ini tidak bertahan lama. Namun sistem ini setidaknya dapat menjaga keselamatan jalan.

Menurut hasil penelitian oleh penelti dilapangan, dapat kita lihat ruas jalan yang diperbaiki dengan

sistem Tambal Sulam. Menurut Bpk. Zulkarnaen hanya beberapa jalan saja yang dapat terealisasi, ini dikarenakan oleh ruas jalan yang diajukan oleh Dinas PU yang seharusnya tiap tahun sekitar 30.000m², namun pemerintah Kota Pekanbaru hanya memberikan kuota sebesar 1/3 dari ruas jalan yang diajukan oleh Dinas PU, sisanya menurut Bpk. Zulkarnaen selaku pejabat PPP3K(Pejabat Pembantu Pelaksanaan Kegiatan. Jadi, untuk Kecamatan Marpoyan Damai hanya sekitar 9 ruas jalan yang diperbaiki dengan sistem Tambal Sulam. Faktor yang menghambat tidak terealisasinya semua usulan perbaikan ruas jalan ini disebabkan hanya pada pendanaanya saja, sedangkan faktor pelakunya tidak menemukan kendala dilapangan. Data ruas jalan tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Rencana Kegiatan Pemeliharaan Jalan O&P

Tahun anggaran 2012

No.	Lokasi	Volume Rencana Luas(m²)	Volume Realisasi Luas (m²)
1	Jl. Bhakti	16	16
2	Jl. Dakota	25	25
3	Jl. Kartama	150	150
4	Jl. Katio	7,5	7,5
5	Jl. Pandan	45	45
6	Jl. Paus	200	200

7	Jl. Pinang	20	20
8	Jl. Rambut an	17,75	17,75
9	Jl. Sembil ang	10	10

Sebuah kegiatan pasti memiliki faktor penghambat pada pelaksanaannya, ntah itu pelaku pelaksana, badan pelaksana bahkan masyarakatnya itu sendiri. Begitu juga pada pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Marpoyan Damai penulis juga dapat menumukan faktor penghambat pelaksanaan program tersebut yaitu :

1. Peralatan

Peralatan merupakan salah satu alat yang terpenting pada pelaksanaan program ini. Kadang dalam proses pelaksanaannya terhenti diakibatkan mesin finisher yang rusak, ini dapat mengakibatkan target capaian tidak dapat terlaksanan dalam kurun waktu yang tertera dalam kontrak.

2. Hujan

Hujan adalah merupakan faktor alam yang menjadi penghambat pada kegiatan perbaikan jalan itu sendiri. Karena yang seharusnya 1 hari dapat memperbaiki jalan sepanjang 500m tidak dapat dilakukan pada hari itu juga, sehingga capaian target pun tidak terpenuhi dan harus dilaksanakan pada hari selanjutnya.

3. Banjir

Banjir merupakan salah satu penghambat pada pelaksanaan

perbaikan jalan. Dimana ketika pelaksana melakukan kegiatan perbaikan jalan yang akan diperbaiki digenangi air sehari-hari sehingga proses perbaikannya memakan waktu.

2. Masyarakat/ warga

Dalam hal ini masyarakat atau warga juga merupakan salah satu penyebab penghambat perbaikan jalan. Dalam hal perbaikan jalan satuan kerja atau Dinas PU terkadang harus melebarkan jalan untuk proses perbaikan jalan itu sendiri. Warga tidak mau bekerjasama atau warga ingin pemerintah mengganti rugi lahannya dengan harga yang lumayan tinggi. Dengan adanya perdebatan Dinas PU dan warga tersebut dapat memakan waktu sehingga pelaksanaan jalannya terbengkalai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sejauh ini pelaksanaan perbaikan jalan sudah tercapai target ditahun 2012, walaupun didalam RKPd yang diusulkan tidak sesuai dengan realisasi dilapangan. Ini bukan dikarenakan oleh Dinas PU sebagai satuan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan, tapi adanya pangkasan dana yang diusulkan. Karena menurut Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru masih banyak lagi prioritas pembangunan yang lebih penting, misalnya seperti pangan kemiskinan, pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga Dinas PU hanya menjalankan kegiatan perbaikan jalan yang menjadi prioritas utama walaupun jalan-jalan yang perlu penanganan juga merupakan program yang penting. Dinas PU juga tidak tinggal diam terhadap jalan-jalan lainnya yang

rusak, karena sisa anggaran tersebut dipergunakan untuk perbaikan jalan. Namun bedanya perbaikan jalan tersebut dilakukan dengan sistem Tambal Sulam, sistem dimana perbaikan jalan yang tidak permanen seperti perbaikan jalan dengan sistem Hotmix dan Overlay Hotmix. Namun, dengan sistem ini setidaknya dapat memberikan rasa aman pada pengguna jalan, walaupun ketika hujan jalan tersebut akan berlobang kembali. Sejauh ini hanya itu yang bisa dilakukan oleh Dinas PU untuk penanganan jalan yang berlobang tersebut.

Pada pelaksanaannya, pelaksana menemukan hambatan-hambatan dalam proses perbaikan tersebut. Dimana faktor penghambatnya yaitu peralatan, hujan, banjir dan masyarakat atau warga. Walau adanya faktor penghambat tersebut Dinas PU mampu mengatasinya walaupun tidak sesuai dengan target yang dicapai, namun satuan pelaksanaan sejauh ini dapat mengatasi hambatan-hambatan dilapangan.

Secara umum permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur jalan adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga tuntutan masyarakat terhadap hak pemerataan pembangunan belum dapat terpenuhi dengan baik. Jika anggaran yang diajukan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru maka program perbaikan infrastruktur jalan dapat terpenuhi. Menurut Pemerintah Daerah perbaikan jalan bukan salah satu program prioritas pemerintah daerah saja, masih banyak lagi program

priritas laennya yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Sehingga jalan yang diperbaiki oleh Dinas PU sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kota Pekanbaru. Arah, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut sudah tertuang didalam RKPD Daerah Kota Pekanbaru, dimana indikator capaian dan kinerja yang akan dicapai sudah tersusun dengan rapi. Dinas PU sebagai SKPD program pembangunan jalan sudah menjalankan program tersebut sesuai dengan RKPD yang telah dirancang oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Menurut Dinas PU pihaknya sudah menjalankan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam RKPD Daerah Kota Pekanbaru, namun pihaknya tidak dapat menjalankan semua pelaksanaan program pembangunan jalan secara keseluruhan, karna kendala yang dhadapai mereka adalah dari segi pendanaan. Menurutnya, pemerintah hanya mengalokasikan dan hanya 1/3 dari data ruas jalan yang diusulkan oleh Dinas PU. Menurut penulis, pembangunan jalan harus benar-benar teleti, jalan yang paling parah dan yang paling sering dialui masyarakat yang paling harus diutamakan, Dinas PU harus benar-benar jeli memilih jalan yang menjadi prioritas utama untuk segera diperbaiki. Tidak hanya itu saja masyarakat juga berperan penting dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan tersebut. Masyarakat jangan membuang sampah sembarang yang

mengakibatkan banjir dan mempengaruhi kualitas jalan itu sendiri. Masyarakat juga harus mengetahui kemampuan pemerintah untuk menangani permasalahan jalan dikarena dana yang dipergunakan bukan untuk kegiatan perbaikan atau pemeliharaan jalan saja, namun masih banyak program-program priritas pemerintah dalam hal pembangunan, bukan pembangunan jalan saja tetapi pembangunan dibidang pendidikan, penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, Dinas PU dan masyarakat dapat bekerjasama dalam program perbaikan dan pemeliharaan jalan didaerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nogi, Hasel, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Balairung & co.2003, Jakarta.
- Nugroho , Riant. D, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Setiawan,B. (1999). *Evaluasi Proyek: Pengertian Evaluasi Proyek,Aspek-aspeknya dan Metode Memperoleh Gagasan*. Bappenas. Jakarta

Sumodiningrat, Gunawan 1997, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Pariwara, Jakarta. Cet.2

Supriatna, T. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sutrisno, 1993, *Pengantar Analisa Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahab,A. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017.

C. Dokumen-Dokumen

RKPJ Tahun 2011
Pekanbaru Dalam Angka 2012

DPA Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Tahun 2012

Tugas dan Fungsi Bina Marga / Bidang Prasarana dan Sarana Jalan

D. Skripsi

Zainal Arifin / 0701133382 “Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Daerah Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Periode 2006-2011.

E. Internet dan Sumber-Sumber Lainnya

Koran Riau Pos, Tanggal 23 Maret 2013, Halaman 33

Koran Tribun Pekanbaru, Tanggal 8 April 2013

Situs Bappeda Kota Pekanbaru, *RPJM Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017*.

Situs Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

Situs Dinas PU